

SKRIPSI

**PROSES *COLLABORATIF GOVERNANCE* PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN
TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE**



OLEH :

A. ADITYA PRAYOGA

E051201021

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KOTA MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PROSES COLLABORATIF GOVERNANCE PEMERINTAH DENGAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI
KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE**

Yang diajukan Oleh:

A. ADITYA PRAYOGA

E051201021

Menyetujui:

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.S.i

NIP. 19601123 1986 03 2001

Pembimbing II

Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 19630407 1989 03 2003

Mengetahui :

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 1991 01 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Aditya Prayoga
Nim : E051201021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PROSES COLLABORATIF GOVERNANCE PEMERINTAH DENGAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI
KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE”**

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Desember 2023

Yang menyatakan



(A. Aditya Prayoga)

ABSTRAK

“PROSES COLLABORATIF GOVERNANCE PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE”

Skripsi dengan judul “Proses Collaboratif Governance Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Kecamatan Tanete Riarrang Kabupaten Bone.” Di bimbing oleh Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.S.i, dan Dr. Indar Arifin, M.Si.

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan permasalahan sampah di Kabupaten Bone khususnya daerah yang menjadi representative Kota Bone yakni Kecamatan Tanete Riattang.

Penelitian ini menggunakan teori parameter yaitu *Collaborative Governance* oleh Ansel dan Gash. Teori yang dikembangkan tersebut terdiri dari 4 indikator penting pertama *starting condition*, kedua *desain instutisional*, ketiga *facilitative Leadership*, dan terakhir *collaborative proses*. Keempat indikator tersebut merupakan hal yang dapat menilai apakah hal yang menjadi objek kajian peneliti telah mampu melakukan kolaborasi proses dengan benar dan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik namun belum dikatakan berjalan optimal, besar harapan pemerintah kedepan untuk bisa mengelola sampah secara holistic dengan pemakaian Kembali, dan pemanfaatan Kembali diharapkan menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kata kunci: pengelolaan sampah, kolaborasi, pemerintah

ABSTRACT

"COLLABORATIVE PROCESS OF GOVERNMENT GOVERNANCE AND THE COMMUNITY IN HANDLING WASTE PROBLEMS IN TANETE RIATTANG DISTRICT, BONE DISTRICT"

Thesis with the title "Collaborative Government Governance Process with the Community in Handling Waste Problems in Tanete Riarrang District, Bone Regency." Supervised by Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.S.i, and Dr. Indar Arifin, M.Sc.

The purpose of writing this thesis is to find out how the collaboration process occurs in managing waste problems in Bone Regency, especially the representative area of Bone City, namely Tanete Riattang District.

This research uses parameter theory, namely Collaborative Governance by Ansel and Gash. The theory developed consists of 4 important indicators, first starting conditions, second institutional design, third facilitative leadership, and finally collaborative processes. These four indicators are things that can assess whether the thing that is the object of the researcher's study has been able to carry out the collaboration process correctly and well.

The results of this research show that the collaboration process between the government and the community is going well, but it cannot be said to be running optimally. There is great hope for the government in the future to be able to manage waste holistically by reusing it, and reusing it is expected to be of economic value for the community.

This study uses a qualitative research method with an inductive approach, the data collection techniques used by the author are interviews, observation and documentation.

Key words: waste management, collaboration, government

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwal Kamil)

“Dalam titik terendahpun hal yang akan menjadi tanggung jawab tetap harus dikerjakan, kegagalan hanya awal dari sebuah proses kesuksesan karena sejatinya sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati perjalanannya dan sampailah titik yang kau impikan.

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan rasa Syukur yang tidak henti penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES COLLABORATIF GOVERNANCE PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE”** dengan sebaik-baiknya. Tak pula penulis juga kirimkan shalawat serta salam kepada idola seluruh umat muslim, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam, yang telah mengantarkan kita dari alam kedelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung karena telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT

memberikan balasannya. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu saya tercinta A. Tenri Angka yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk saya bisa menjalani Pendidikan saya di Universitas Hassanudiin.
2. Nenek saya Sitti Abbasia yang telah berpulang kepangkuan Ilahi, beliau sangat besar andilnya dalam Pendidikan saya.
3. Tante saya yang telah mengangkat dan memperlakukan saya selayaknya anak yaitu Incadarni, S.Pd beliau yang memotivasi dan memberikan dukungan penuh untuk saya bisa melanjutkan study saya.
4. Seluruh Keluarga dan kakak saya tercinta A. Ari Anuggrah yang membantu, mendoakan serta memberikan dukungan tinggi untuk penulis menggapai cita-citanya.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.S.i selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para sahabat saya yakni Fadia Apriliana, Muh. Nur abadi yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat memotivasi.
7. Teruntuk Para sahabat penulis selama berkuliah di Ilmu Pemerintahan yaitu Muh. Walid, Happy, A. Nur azizah yang telah

meluangkan waktu, tenaga, materi dan pikiran serta memberikan dorongan semangat untuk bisa mewujudkan mimpi bersama.

8. Tasyafah Kamilah selaku partner yang memberikan dukungan, prasaan, dan tenaga untuk membantu penulis, menjadi orang yang sangat besar pedulinya dalam penulisan akhir skripsi.
9. Seluruh keluarga angkat penulis yakni Cece Lanny Sutanti, Angela, Yosua Rich yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis hingga penulisan ini selesai.
10. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah berusaha sekuat tenaga untuk bisa terus bertahan, terima kasih karena telah melakukan banyak hal diluar dugaan dan berani mengambil Keputusan yang besar, terima kasih untuk badan yang tetap kuat, kaki yang lemah namun dipaksa bertahan, dan mata yang tak pernah bohong menahan beratnya perkuliahan, dan kerja di saat yang bersamaan. terselesaikannya skripsi ini merupakan awal dari cerita sukses kita, mari terus berjalan bersama raga dan jiwa yang sehat, mencoba hal untuk lebih kenal dengan diri, kitab isa beriringan mewujudkan Impian ini, tuhan selalu bersama kita yang ingin berusaha dan berdoa hal yang seriiing kita panjaatkan dalam doa kita setelah sujud itu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu kepada semua pihak, khususnya para pembaca yang Budiman, dengan senang hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini dan jauh dari kata sempurna dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya kepada almamater tercinta Universitas Hasanuddin.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassamu Alaikum
Waramatullahi Wabarokatu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep <i>Collaborative Governance</i>	11
2.2. Proses <i>Collaborative Governance</i>	13
2.3. Pengelolaan Sampah	18
2.4. Landasan Legalistik.....	22
2.5. Penelitian Sebelumnya.....	28
2.6 Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.2 Pendekatan Penelitian.....	34

3.3	Tehnik Pengumpulan Data	36
3.4.	Unit dan Sumber Data	39
3.5.	Deskripsi Fokus	40
3.6.	Instrumen Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1	Gambaran Umum Kabupten Bone	41
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Bone	44
4.1.3	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	46
4.1.4	Visi dan Misi yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup	46
4.1.5	Struktur Organisasi	48
4.2	Hasil Penelitian.....	54
4.2.1	Proses Collaboration Governance Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone	54
4.3	Pembahasan	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		105
5.1	Kesimpulan.....	105
5.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109

DAFTAR GAMBAR

Grafik	1.1:	Penanganan Sampah di Wilaya Perkotaan.....	6
Gambar	2.1:	Model Collaborative Governance Ansel and Gash	21
Gambar	2.2:	Sistem Pengelolaan Sampah Konvensional.....	25
Gambar	2.3:	Pengelolaan Sampah Modern	25
Gambar	2.4:	Kerangka Pikir	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Presentasi jumlah sampah yang tertangani di kabupaten bone berdasarkan kecamatan, 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi problematika pada sistem pemerintahan indonesia proses *collaborative governance* merupakan sebuah alternatif yang mengacu pada kerja sama pada berbagai sektor termasuk salah satunya pemerintah dan masyarakat. *Collaborative governance* merupakan model *governance* yang mendorong pemangku kepentingan dan aktor nonnegara untuk berkolaborasi dalam pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi permasalahan yang rumit dan kompleks.

Kerja sama adalah jawaban pemerintah dalam memecahkan masalah publik yang kompleks sumber daya yang terbatas dan efisiensi anggaran merupakan pokok permasalahan. Kerjasama manajemen dipadang sebagai solusi masalah sosial yang kronis, Menyusun rencana pembangunan daerah melalui kerjasama antar kebijakan perlindungan lingkungan pemangku kepentingan.

Masalah sampah merupakan masalah sosial di Indonesia. Ini ditunjukkan dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023 total produksi sampah domestik yang dahulunya di tahun 2021 67,8 juta ton kini meningkat hingga 70 juta ton di awal tahun ini. Artinya setiap hari

dengan 270 juta sampah 185.753 ton atau per kapita menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Pembuangan sampah banyak pihak yang harus dihadapi karena ini membutuhkan kerja sama yang intensif solusi

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan negara pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu hal-hal yang diberikan oleh pemerintah kepada negara dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kawasan tergantung dengan urusannya masing-masing. UU No 24 Tahun 2014 menyatakan bahwa masalah pengelolaan sampah dipecah menjadi menjadi urusan pemerintah konkuren yaitu pembagian pengembangan atas kepentingan strategis nasional, regional dan Kab / Kota.

Pemerintah Kabupaten Bone memiliki kepedulian dengan lingkungan hidup yang dideskripsikan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yakni menciptakan masyarakat Bone yang mandiri berdaya saing dan sejahtera memprioritaskan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat dari aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 6 Tahun 2020. Dinas lingkungan hidup memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone masih jauh dari harapan yang diinginkan. Pemerintah hanya memerintah sampah dengan memberikan fokus titik di 3 (tiga) kecamatan di pusat kota, Adapun tiga kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur. Pemerintah Kabupaten Bone belum bisa mengelola sampah dengan baik di 24 lokasi lainnya. Hal ini dapat terlihat sesuai data yang ada yang kemudian menjadi acuan saya dalam meneliti hal ini adapun Data pengelolaan sampah Kabupaten Bone dirinci dalam table di bawah ini :

Tabel 1.1

Presentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Di Kabupaten Bone Berdasarkan Kecamatan, 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone 2018-2023

No	Kecamatan	Jumlah Sampah yang ditangani (ton)	Jumlah Volume Produksi Sampah (ton)	presentasi yang ditangani
1	2	3	4	5
1	Bontocani	300	2.715,6	4,74
2	Kahu	400	8.365,8	2,57
3	Kajuara	300	5.515,15	3,11
4	Salomekko	300	2.469,6	5,16
5	Tonra	300	3.438,3	6,00
6	Patimpeng	300	5.420,25	4,65
7	Libureng	300	5.161,1	2,38
8	Mare	300	5.318,05	3,12
9	Sibulue	400	4.348,4	3,23
10	Cina	400	4.376,35	3,87
11	Barebbo	400	2.792,25	3,92

1	2	3	4	5
12	Ponre	100	4.324	1,54
13	Lappariaja	200	2.792,25	2,03
14	Lamuru	300	4.324	2,90
15	Tellu limpoe	100	4.445,7	1,85
16	Bengo	300	2.325,05	2,89
17	Ulaweng	200	4.4449,93	2,15
18	Palakka	300	4.989,55	2,66
19	Awanpone	300	6.007,9	2,68
20	T. Siattinge	300	6.821,85	1,89
21	Amali	300	3.821,55	2,37
23	Ajangale	400	4.737,7	3,63
24	Dua Boccoe	400	5.347,25	3,30
25	Cenrana	300	3.971	3,30
26	TR. Barat	24.420	8.948,8	99,59
27	T.R Timur	20.000	7.420,45	98,38
28	Tanete Riattang	26.700	9.847,7	98,98
Total		80,970	134,950	60,00

Sumber: Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup 2023

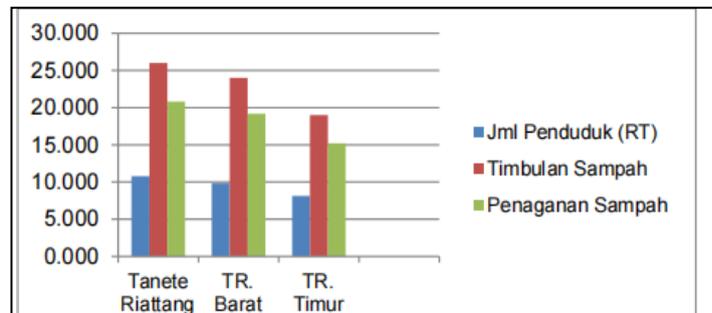
Hasil data yang saya peroleh di atas angka 60% presentasi sampah yang telah ditangani oleh pemerintah belum bisa menggambarkan pengelolaan sampah secara keseluruhan, hal ini dikarenakan pelayanan pengelolaan sampah hanya dilaksanakan pada beberapa titik fokus pemerintah yakni Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur dan beberapa kecamatan diatas yang terdiri dari 24 kecamatan lainnya belum tersentuh. Sementara itu jumlah sampah yang dikurangi dari pengelolaan sampah hanya sebesar 17,5 ton dari jumlah total

sampah sebanyak 134.950 ton. Hal ini tentu tidak sebanding antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan upaya penanggulangannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu produksi sampah yang dihasilkan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Timbulan sampah yang ditimbulkan di tempat pembuangan akhir tentu saja seiring berjalannya waktu akan *overload*. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone karena dalam pengelolaannya TPA Passippo menggunakan sistem semi *open dumping*.

Grafik 1.1

**Grafik Penanganan Sampah Di Wilayah Perkotaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup**



Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup 2023

Wilayah perkotaan dengan luas 126.35 km persegi dengan jumlah penduduk dinas lingkungan hidup sebanyak 267 orang tentu ini tidak sebanding dengan upaya penanganan sampah dengan jumlah penduduk 145.394 jiwa. Data pegawai tersebut menyiratkan bahwa satu orang petugas kebersihan melayani 369 jiwa penduduk. Hal ini juga berkaitan

dengan keberadaan sampah di Kabupaten Bone. Nah hal inilah yang seharusnya membuat anggota pemerintahan bertindak melakukan inovasi dan membentuk kolaborasi yang baik guna meningkatkan efisiensi kinerja dalam penanggulangan sampah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 menyatakan dengan jelas bahwa pengelolaan sampah harus menjadi komitmen pemerintah serta dengan melibatkan beberapa pihak. Pengelolaan ini mengacu pada kolaborasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Terdiri dari masyarakat dan tentunya pemerintah juga melibatkan LSM, pihak swasta, dan pemerintah menjadi model ideal (Zamrud dan Padmi, 2010:25)

Kolaborasi pemerintah dengan menggerakkan seluruh *stakeholders* untuk bersama dan menerapkan rasa tanggung jawab secara kolektif dengan tujuan untuk menangani permasalahan sampah (Sulfiyanti, 2011). proses penanganan dan pengelolaan sampah secara kolaborasi ini telah dibangun dengan melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerja sama antar swadaya masyarakat, organisasi bank sampah masyarakat, pemeliharaan fasilitas umum (PPSU) dan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pihak swasta. Dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Tampubolon, 2019). Keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi sangat ditentukan oleh komitmen, partisipasi aktif semua aktor, profesionalisme dan transparansi (Rosyadi dan Lestianingrum, 2013).

Konsep pengelolaan sampah berbasis kolaborasi didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang membuka kesempatan seluas-luasnya berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Sistem 3R dalam pengelolaan sampah di level masyarakat namun sistem *reduce, reuse, dan recycle* ini dijadikan sebagai program konvensional yang masih menggunakan cara timbun, angkut, dan buang. Pengelolaan sampah lainnya dilakukan dengan pembentukan bank sampah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021) pendirian bank sampah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah dengan pengelolaan - pengelolaan yang dilakukan dan sekaligus dalam penanganan lingkungan.

Di kecamatan tanete riattang dengan penduduk sebanyak 53,529 Jiwa saat ini mulai cukup dan mengaktualisasi kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Hal yang bisa terlihat dari kepedulian pemerintah kecamatan tanete riattang adalah dengan aktif dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan arahan Dinas terkait untuk melakukan aksi MABESSA yakni suatu program yang digagas oleh dinas lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Bone yakni "Mari Bersedekah Sampah". Hal yang menjadi urgensi adalah pengelolaan sampah yang buruk di pusat kota akan berdampak pada *image* Kabupaten Bone secara keseluruhan, terlebih Kecamatan Tanete Riattang merupakan pusat kota yang mewakili wajah Kabupaten Bone. Hal yang saat

ini peneliti bisa lihat adalah kolaborasi pengelolaan sampah baru pada tahap inisiasi dan dan gerakan kecil dan sampai saat ini masih kurang konsisten dalam menggerakkan seluruh *Stakeholders* terkait. Tahap awal yang sedang dilakukan adalah pembentukan minat dan solusi untuk masyarakat dan secara paralel dilakukan pembangunan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengelola sampah. Pembangunan kolaborasi antar lembaga pemerintah, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup – Kecamatan Tanete Riattang - Bagian Kerjasama sebagai supporting system pendukung proses kolaborasi. Pembangunan kolaborasi juga dilakukan antara kecamatan-kelurahan juga untuk menjadi unsur-unsur penjamin kesuksesan proses kolaborasi juga menuntut semua aktor untuk bertanggungjawab, bergerak untuk mengelola sampah bersama.

Segala pernyataan dan faktual yang telah diuraikan berkaitan dengan proses pengelolaan sampah dan peranan pemerintah serta masyarakat untuk menangani hal ini dengan mengedepankan kolaborasi dengan menggunakan parameter Ansel dan Gash yang memudahkan pemerintah untuk bisa bersama-sama menghasilkan kolaborasi yang baik untuk menciptakan keefisienan maka, peneliti tertarik dan berkesempatan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Proses Kolaborasi Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang KabupatenBone”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah di Kabupaten Bone.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini adalah bertujuan untuk melakukan identifikasi kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah di kabupaten bone khususnya di Kecamatan Tanete Riattang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Bone khususnya Kecamatan Tanete Riattang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan salah satu model *governance* yang dipopulerkan beberapa dekade terakhir ini untuk menggambarkan kolaborasi tata kelola pemerintahan. Model *collaborative Governance* dianggap sesuai dengan perkembangan situasi lingkungan yang penuh dengan keragaman dan kompleksitas. Hal ini sejalan dengan dikemukakan Paquet (2001:2003) dalam Minadarti (2015:149):

“in our turbulent environment, strategic management is no longer sufficient, what is required is the development of capacities for collaborative action in managing large-scale reorganization and structural changes at the macro level”. Paquet (2001:2003) dalam Minadarti (2015:149):

Kolaborasi merupakan jawaban dari upaya dan respon dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang bersifat kompleks ditengah keterbatasan. Raharja (2008:223) juga mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah hubungan yang dibangun antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang sulit direalisasikan jika dilaksanakan secara independen. Balogh (2011:2) mengemukakan bahwa *collaborative governance* adalah struktur dan proses publik dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan pihak aktor secara konstruktif baik

dari institusi pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta agar mencapai tujuan yang jika dilakukan oleh satu pihak sulit untuk dicapai.

Menurut Ansel dan Gash (2007:544) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan pengaturan yang dilakukan oleh lembaga publik yang melibatkan pemangku kepentingan *non government organization* dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik dan mengelola sumberdaya secara bersama. Berdasarkan definisi Ansel dan Gash (2007:544) menjelaskan ada enam faktor penting yaitu : (1) kolaborasi diinisiasi oleh organisasi pemerintah, (2) kolaborasi melibatkan aktor pemerintah dan non pemerintah, (3) seluruh aktor berkontribusi dalam pengambilan keputusan bukan dalam artian “dikonsultasikan” kepada pihak pemerintah, (4) kolaborasi diatur secara formal dan berunding secara rutin, (5) tujuan kolaborasi untuk mengambil kebijakan yang bersifat konsensus, dan (6) fokus kolaborasi adalah untuk pembuatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Paquet (2001:206-207) menjelaskan dalam *collaborative governance* mereka menempatkan peran utama pemerintah lebih ditekankan pada fungsi-fungsi untuk memainkan peran dalam tahap memulai, mengkatalisasi dan mengarahkan pembelajaran sosial sementara membiarkan dua domain lainnya (sektor swasta dan masyarakat sipil) untuk menempati peran mereka sendiri semaksimal mungkin.

Definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan model *governance* yang mendorong upaya bersama. Model ini muncul akibat permasalahan publik yang jika dilakukan oleh satu domain akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Kolaborasi melibatkan berbagai pihak untuk saling bekerjasama baik dari pihak pemerintah, masyarakat sipil, NGO, dan stakeholder lainnya untuk pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah publik.

2.2. Proses *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governace* yang diperkenalkan Ansel dan Gash (2007) menjelaskan bahwa empat variable yang menjadi pengaruh dari *collaborative governance* yaitu meliputi:

1. *Starting Conduction* (kondisi awal)

Situasi awal antara pemangku kepentingan dan antara lembaga berangkat dari kondisi yang berbeda dalam kondisi awal ini. Tahap ini mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan saling menghormati satu sama lain.

2. *Institutional Design* (desain institusional)

Desain institusional dengan memperhatikan protokol dan aturan-aturan dasar untuk legitimasi prosedural dan proses kolaboratif. Penyelenggaraanya harus bersifat terbuka dan inklusif agar setiap kelompok merasa kesempatan untuk berpartisipasi.

3. *Fasilitative Leadership* (kepemimpinan fasilitatif)

Aspek kepemimpinan merupakan unsur penting dalam mengantar pemangku kepentingan yang berkolaborasi kedalam perundingan dan negosiasi untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menyatukan mereka dalam semangat kolaboratif.

4. *Collaborative Process* (proses kolaborasi)

1) *Face To Face Dialogue* (dialog tatap muka)

Collaborative governance dimulai dari proses tatap muka antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan konsensus dengan tujuan akhir agar tercapainya keuntungan bersama. Proses tatap muka antara pemangku kepentingan ini dikatakan berjalan jika proses ini dilakukan secara rutin. Maksud dari proses ini untuk membangun kepercayaan, berbagai pemahaman dan terciptanya saling menghormati antar pemangku kepentingan.

2) *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Faktor *trust* (kepercayaan) dalam proses kolaborasi merupakan faktor penting agar terjalannya kolaborasi yang baik bukan hanya mengenai negosiasi antar pemangku kepentingannya tetapi tentang membangun kepercayaan secara bersama.

3) *To Process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen merupakan salah satu aspek yang dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kolaborasi. Komitmen

untuk membangun kolaborasi agar pemangku kepentingan yang terlibat merasa memiliki terhadap tujuan yang ingin dicapai dan terjalinnya kerjasama yang berkelanjutan.

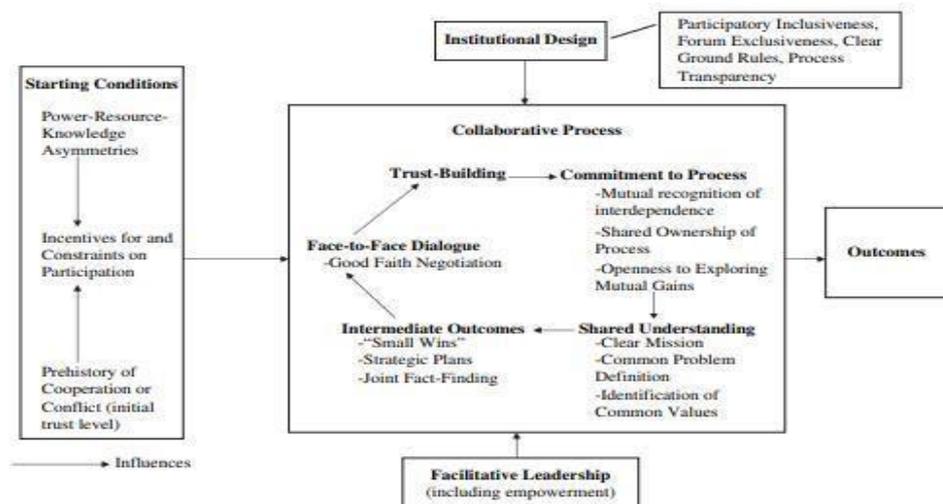
4) *Share Understanding* (pemahaman bersama)

Proses kolaborasi membangun pemahaman bersama antar pemangku kepentingan merupakan hal penting untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap masalah, visi, misi, tujuan, ideologi bersama dan penyelarasan nilai-nilai inti.

5) *Intermediate Outcome* (hasil sementara)

Hasil sementara adalah dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal sehingga kesuksesan ini berguna untuk membangun kepercayaan, dapat mendorong terjadinya kolaborasi.

Gambar 2.1: Model Collaborative Governance Ansel and Gash, Pengelolaan sampah Modern Ansel dan Gash 2006



Sumber: Data Pustaka Ansel dan Gash 2006

Teori lain lainnya juga terdapat teori yang dikembangkan oleh Morse dan Stephens (2012: 567-569) mengatakan tahapan *collaborative governance* yang merupakan suatu tahapan universal dari proses *collaborative governance* bersumber pada literatur yang mereka kaji :

1. Penilaian Tahapan awal dari *collaborative governance* adalah melaksanakan penilaian. Tahap ini adalah keadaan dini yang sangat mempengaruhi keberhasilan serta penilaian dalam suatu kemitraan, apakah kerja sama memanglah benar dibutuhkan serta tepatkah untuk meliputi :

- 1) Menguasai faktor-faktor kontekstual meliputi sejarah kerjasama secara intensif kelembagaan lain ataupun peksaan.
- 2) Mengenali stakeholders.
- 3) Kesepakatan umum dalam memecahkan masalah agar mencapai tujuan bersama.
- 4) Komitmen saat ini mengejar pemecahan kolaboratif.

2. Insiasi merupakan suatu permulaan dari proses *collaborative governance*. Setelah melihat bahwa kondisi tersebut untuk memungkinkan terlaksananya kolaborasi dan adanya potensi keuntungan, proses bersinambung dan evaluasi ke inisiasi. Proses inisiasi meliputi ;

- 1) Mengenali pengadaan serta kedudukan sponsor, yang meliputi mengenali sumber daya.

- 2) Mempertemukan pemangku kepentingan, meningkatkan kelompok kerja, serta mendesain proses.
3. Pertimbangan setelah mengawali proses dengan kelompok inti dari pemangku kepentingan serta terdapatnya suatu komitmen untuk menjalin kerjasama dengan bermacam metode, pekerjaan berikutnya yang terbilang susah, yaitu pertimbangan kolaborasi yang hendak diawali. Disini kemampuan sarana dikedepankan. Faktor fase pertimbangan mencakup :
 - 1) Membangun ketentuan dasar.
 - 2) Musyawara serta diskusi selaku bagian dari proses silih belajar bertujuan menghasilkan serta mengeksplorasi opsi.
 - 3) Menggapai kesepakatan kolaboratif.
4. Implementasi yang menjadi tahapan terakhir dari proses *collaborative governance*, yaitu penerapan dari apa yang sudah disepakati pada fase pertimbangan tadinya bersama para stakeholders. Setelah kelompok memutuskan hasil serta strategi, proses kolaboratif bergerak ke sesi implementasi. Implementasi mengaitkan bermacam komponen yang saling menunjang, meliputi:
 - 1) Merancang struktur tata pemerintahan.
 - 2) Pemantau perjanjian, mengevaluasi hasil, serta yang lain yaitu mengelola kemitraan.

Penulis menerapkan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash untuk mengidentifikasi *collaborative*

governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan karena penulis menganggap teori ini dapat mendeskripsikan kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dengan mengharapkan teori ini dapat digunakan dengan aktualisasi yang optimal.

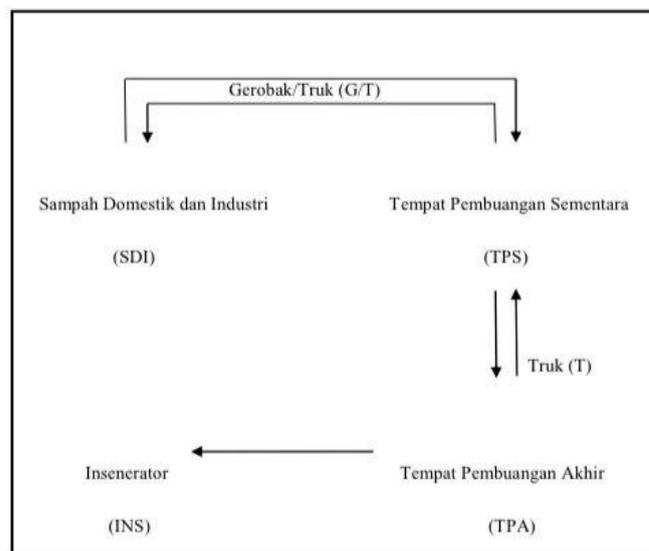
2.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Pengelolaan sampah merupakan keindahan yang tercipta akibat dari penanganan dan pengurangan sampah yang dilakukan secara bersama antara kelompok - kelompok kepentingan. Neolaka (2008 :66) artinya pengelolaan sampah yang sudah disepakati oleh pihak pemerintah serta aktor non negara untuk melakukan pengelolaan sampah kerjasama tersebut wajib didukung penuh oleh masyarakat selaku salah satu penghasil sampah terbanyak. Masalah dan kelompok lainnya menghasilkan sampah untuk itu dalam penanganan sampah merupakan kewajiban kita bersama sebagai warga negara yang baik.

Kastaman dan kramadibrata (2007:17) dalam Riduan (2021:34-35) pengelolaan sampah terdiri dari beberapa tahap proses meliputi: pertama, pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah pada tempat sementara agar menjaga kebersihan dan estetika. Perwadahan ini dibagi

atas perwadahan individual dan komunal. Kedua, pengumpulan sampah merupakan pengambilan sampah yang dilakukan baik dari petugas pemerintah daerah atau pihak swasta ditunjuk. Pengumpulan ini dilakukan untuk mempersiapkan sampah sebelum proses pemindahan hasil pengumpulan sampah ke dalam pengangkutan (truk). Keempat, pengumpulan sampah yaitu proses pemindahan sampah ke tempat pembuangan akhir. Kelima, pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Keenam, pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir membutuhkan tempat yang luas dan jauh dari permukiman. Macam-macam tempat pembuangan akhir yaitu *open dumping* yakni membuang sampah ditempat terbuka, *control landfil* yaitu sama halnya *open dumping* namun ada hal pengendalian dan pengawasan, dan *sanitary landfill* pada tempat pembuangan akhir yakni menimbun sampah di dalam tanah sehingga tidak menimbulkan polusi.

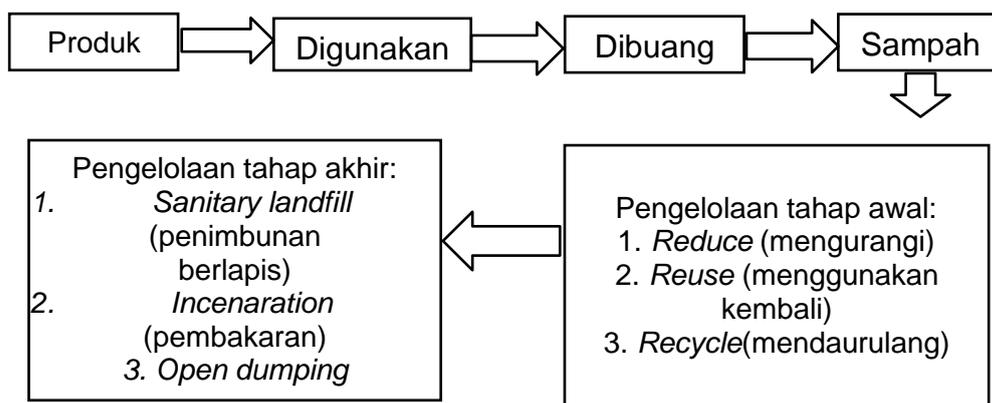
Gambar 2.2: Sistem Pengelolaan Sampah Konvensional



Sumber: Data Pustaka Ansel dan Gash 2006

Cunningham (2004) dalam Bachtiar (2015:129) agar sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan, maka diperlukan pengelolaan sampah untuk mengurangi dan memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan. Cunningham mendeskripsi pengelolaan sampah modern adalah mengelola sampah yang diproduksi dengan proses 3R yaitu *reuse* (mengurangi) *reduce* (mengggunakan kembali) dan *reycle* (mendaur ulang).

Gambar 2.3: Pengelolaan Sampah Modern



Sumber: Data Pustaka Anse Dan Gash 2006

Panji Nugroho (2013) menjelaskan bahwa ada 5 prinsip dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan istilah 5M, Pertama, mengurangi yaitu dengan meminimalisir penggunaan barang habis pakai. Kedua, menggunakan kembali yaitu dengan penggunaan barang yang dapat digunakan kembali bukan barang sekali pakai yaitu dengan penggunaan produk yang dapat diisi ulang. Ketiga, mendaur ulang yaitu mencari barang yang dapat didaur ulang agar dapat dimanfaatkan kembali dengan usaha mengubah barang bekas menjadi barang berguna dan layak pakai.

Keempat, mengganti yaitu mencari barang yang sekali pakai diganti dengan batang yang ramah lingkungan dan kelima, menghargai yaitu menempatkan alam sebagai suatu objek yang harus dicintai sehingga masyarakat lebih menghargai alam dengan menggunakan barang lebih bijaksan.

Saat ini upaya pemerintah ialah salah satunya dengan penerapan 3R menciptakan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu dengan pendirian bank sampah. Menempatkan bank sampah sebagai penggerak dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat untuk menekankan pada penataan sampah. Pelaksanaan bank sampah dapat memberikan imbal hasil bagi pihak yang berkolaborasi dalam penanganan sampah ini. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 3R, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang mampu menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat, kemandirian, efisiensi, produktivitas, keamanan, ekologis, dan koordinasi (Riswan dan Hadiyanto, 2011)

Sistem pengelolaan sampah yang telah dijabarkan diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengurangi dan menangani sampah yang ada di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan sampah seharusnya perlu kejelasan dan tanggung jawab mengenai kewenangan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2.4. Landasan Legalistik

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat dari aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 6 Tahun 2020. Dinas lingkungan hidup memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah.

2.4.1. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2020

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat dari aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 6 Tahun 2020. Dinas lingkungan hidup memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengelolaan, pengurangan dan penanganan sampah.

2.4.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Penegasan undang-undang ini menekankan bahwa perlunya perubahan paradigma masyarakat yang melihat sampah sebagai barang sisa tidak menguntungkan. Bentuk pendekatan sampah yang masih akhir yaitu (*end-of-pipe*) yaitu timbun, angkut dan buang ke tempat pemrosesan akhir, sudah saatnya diganti menjadi pengelolaan sampah yang sistematis dan terintegritas dari hilir ke hulu. Pengelolaan sampah dengan keterlibatan seluruh pihak merupakan salah satu solusinya.

2.4.3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa sampah rumah tangga merupakan seluruh sampah kecuali tinja dan sampah spesifik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Sampah rumah tangga ialah sampah yang berasal dari sektor komersial, industri, khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pengaturan sangat diperlukan untuk menjaga agar sampah yang dihasilkan dapat menjadi sumber daya dan tidak terdapat pada kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dijelaskan pada pasal 11 ayat 2, pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- 1) Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- 2) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak sebagai penghasil sampah. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Penanganan sampah ini setidaknya

dilengkapi dengan fasilitas TPS, TPS 3R dan atau alat pengumpul sampah terpilah.

Pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam pemilahan sampah dilakukan dengan melakukan pengelompokan sampah dengan pembagian 5 (lima) jenis sampah terdiri atas :

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Sampah yang mudah terurai;
- 3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya

Mengenai kegiatan pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan sampah dapat membentuk kelembagaan pengelola sampah. Bermitra dengan badan usaha atau kelembagaan pengelola sampah. Bermitra dengan badan usaha atau masyarakat dan/atau bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota lain.

2.4.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pada Bank Sampah

Peraturan ini merupakan pengganti peraturan menteri negara lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Peraturan menteri ini dibuat dengan pemahaman bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat dari hulu hingga hilir. Persoalan ini menggunakan pendekatan ekonomi sirkular, agar dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan serta kelestarian bagi lingkungan. Selain itu, sebagai bentuk edukasi, penekanan bank sampah sebagai sarana pengelolaan sampah sesuai prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dapat membantu meningkatkan perilaku pengelolaan sampah

Bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan bank sampah dapat dilakukan dengan prinsip kemitraan, yang mensyaratkan kerjasama antara berbagai pihak baik dari masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah serta pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan dengan prinsip saling membutuhkan, menguatkan, dan menguntungkan. Pasal 14 dijelaskan mengenai kerjasama dalam pengelolaan bank sampah:

1. Dalam melakukan kemitraan pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara : a. Bank sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau b. Bank sampah dengan produsen
2. Fasilitasi kerja sama antara bank sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk: a. memastikan pemasaran sampah terpilah dari bank sampah ke usaha dan/atau kegiatan daur ulang; b. memastikan ketersediaan sampah terpilah sebagai bahan baku bagi usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau c. memastikan posisi tawar harga sampah terpilah.

Lampiran 1 (satu) undang-undang ini menjelaskan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah dua jenis sampah yang dapat dikelola bank sampah dengan metode pengelolaan sampah dan pengurangan sampah dilakukan dengan proses daur ulang, harus diingat adalah sampah dapat juga digunakan kembali dengan cara sesuai dengan tujuann atau fungsi yang sama / berbeda tanpa harus melalui proses pengelolaan terlebih dahulu.

Sampah yang dimanfaatkan ulang ialah sampah yang memiliki sifat dapat digunakan kembali. Sampah plastik, kertas, logam, dan kaca merupakan contoh sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Seharusnya pengelola bank sampah harus betul paham setiap

pegiatan penanganan sampah untuk mengidentifikasi jenis penanganan sampah yang mana dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari bank sampah yang dikelolanya. Selanjutnya, pengelola bank sampah dapat menentukan nilai ekonomis dan potensi sampah yang dikelola dengan mengetahui relevansi dari setiap tahap penanganan sampah.

Tahap pertama mengelompokkan sampah menjadi lima jenis, dilakukan sebagai bagian dari proses pengelolaan sampah. Limbah yang mengandung limbah B3 dan/atau B3; sampah yang terurai dengan cepat melalui mekanisme alami; sampah yang dapat digunakan kembali sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya. Kedua, operasi pengumpulan sampah dilakukan untuk mengangkut sampah dari sumbernya. yang dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan sampah di bank sampah. Pengumpulan sampah akan sederhana jika sampah telah dipisahkan dari sumbernya, yang akan mempercepat proses pengelolaan lanjutan bank sampah. Akibatnya, pengelolaan bank sampah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau kesepakatan dengan kepala keluarga masing-masing di wilayah pengelolaan sampah.

2.5. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang juga sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ely Sufianti pada tahun 2011 dalam jurnal dengan judul "Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan". Penelitian ini menjabarkan mengenai praktik dan juga konsep dan praktik perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah. adapun metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dalam pengelolaan sampah dibutuhkan ketertiban aktif pemangku kepentingan. Keberhasilan perencanaan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan. Penerapan konsep kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga tidak mustahil untuk diterapkan. Keterlibatan pemangku kepentingan diikat dalam proses kolaborasi dengan keberhasilan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan perencanaan dalam melihat karakteristik masyarakat dan permasalahan yang ada. Persamaan pada penelitian ini adalah memakai teori Ansel dan Gash sebagai acuan perencanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah, namun perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penulis sebagai penelitiannya menerapkan di Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan pada penelitian yang dilakukan oleh Ely Sufianti hanya bersifat perencanaan dan belum mengidentifikasi di daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu pada tahun 2019 dalam jurnal dengan judul penanganan sampah secara kolaboratif antara masyarakat dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (kasus

penanganan sampah di kelurahan jembatan lima kecamatan tambora kota administrasi jakarta barat) penelitian ini menjelaskan mengenai proses tata kelola kolaborasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan sampah antara masyarakat dengan petugas penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, adapun pendekatan yang dipakai dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah telah terjadi proses kolaborasi. Kolaborasi terbentuk dan terjalin dengan kendala yaitu masyarakat yang belum terbiasa dalam memilah sampah namun adanya dialog untuk mencari solusi dalam penyelesaiannya. Persamaan penelitian ini adalah memakai teori Ansel dan Gash sebagai pisau analisis, adapun perbedaannya adalah lokus penelitian di Kabupaten Bone dan penelitian yang dilakukan berusaha mengidentifikasi kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang bisa terlibat dalam pengelolaan sampah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Rosyadi dan Era Lestianingrum pada tahun 2013 dalam jurnal dengan judul Pemodelan Sampah Permukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi (Studi Kasus Di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pola kolaborasi antara pihak swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu mix method. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dalam pengelolaan sampah juga perlu

dilakukan dalam manajemen kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan dan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan dari kolaborasi dipengaruhi oleh komitmen, kemauan berpartisipasi, sikap profesional dan keterbukaan dalam menjalankan kolaborasi. Hasil-hasil yang diperoleh dari dijalankannya kolaborasi di Desa Palimanan Barat yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat melalui BUMDES, meningkatnya kapasitas institusi lokal dan kontribusi pada perbaikan lingkungan. Persamaan penelitian yaitu menggunakan konsep kolaborasi dalam melihat penyelesaian permasalahan sampah. Namun, terdapat persamaan yaitu pada penelitian ini menggunakan teori Ansel dan Gash sebagai pisau analisis melihat *Collaborative Governance* yang dibangun dan melihat kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan yang berpartisipasi

2.6 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting. Serta kerangka pemikiran menurut Sapto Haryoko yaitu Sapto Haryoko mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah penelitian yang di mana variabel yang digunakan ada dua atau lebih. Adapun kerangka pikir penelitian ini menggunakan teori Ansel dan Gash.

Gambar 2.4: Kerangka Pikir

